

PENGAWASAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA

NARIFUL HUDAH

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
narifulhuda@yahoo.com

PUDJI ASTUTI

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.co.id

Abstrak

Tahanan kepolisian yang berhasil melarikan diri di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang mengindikasikan pengawasan yang dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Surabaya (Sattahti) masih belum maksimal, meskipun secara kuantitatif kejadian tersebut hanya terjadi dengan jumlah tahanan yang ada dalam rumah tahanan polrestabes Surabaya berjumlah 36 untuk bulan Januari dan 42 untuk bulan Februari per tahun 2016. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengawasan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap tahanan dan hambatanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, informan petugas jaga tahanan dan tahanan, jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan jaga tahanan di Sattahti Polrestabes Surabaya masih terlalu kaku dalam penerapan jumlah petugas jaga tahanan yang dalam ketentuan Peraturan Kapolri hanya memberikan batas minimal dua petugas namun tidak terbatas pada jumlah maksimal, dengan dua petugas jaga tahanan yang mengawasi total 315 tahanan dalam implementasinya tentu sangat riskan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahanan melarikan diri ataupun keributan antar tahanan. Dan Hambatan yang dihadapi oleh Sattahti terkait pengawasan yang efektif dan efisien ialah kurangnya petugas jaga yang ditempatkan di setiap bloknya, sarana berupa ruang tahanan yang rusak atau tidak layak serta kondisi berlebihan atau *overload* pada kamar hunian turut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Sattahti Polrestabes Surabaya.

Kata Kunci : penyidikan, rumah tahanan, pengawasan jaga tahanan.

Abstract

Prisoners police who managed to escape in Polrestabes Surabaya, which indicates the oversight conducted Sattahti still not up, though quantitatively these events happen only once according to provisional data obtained by researchers, the number of prisoners who are in prison Polrestabes Surabaya total of 36 to January and February 42 for the year 2016. The purpose of writing this article to know the supervision of the Surabaya City Resort Police against prisoners and to determine the obstacles supervision of the guard duty officer in the Police Resort of Surabaya Besar City. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative deskriptif. The results showed that the supervision of guard prisoners in Sattahti Polrestabes Surabaya still too rigid in the application of the number of guard prisoners in the provisions of the Regulation only provides for a minimum of two officers but not limited to the maximum amount, with two guard prisoners who oversees a total of 315 prisoners in implementation is certainly very risky with things that are not desirable as prisoners escaped or commotion among prisoners. And Barriers faced by Related Sattahti effective monitoring and efisien is the lack of the guard stationed at each of blocks, means in the form of a detention room faulty or improper and excessive or overload conditions on occupancy rooms also influence the supervision carried out Sattahti Polrestabes Surabaya.

Keyword : instivegated, jail, keep control of prisoner

PENDAHULUAN

Penahanan dilakukan oleh penyidik dengan tujuan mengumpulkan bukti yang kuat untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana, penahanan juga bertujuan agar tersangka tindak pidana tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Penahan dapat dilakukan apabila adanya surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yang berisi : identitas tersangka, menyebut alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan, menyebut dengan jelas ditempat mana tersangka ditahan serta menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu penyidik dan Jaksa Penuntut Umum atau hakim.

Kesimpulannya, penahanan yang dilakukan kepolisian berdasarkan porsi kepentingannya. Pengawasan terhadap tahanan yang ditempatkan di kepolisian tentu haruslah diperhatikan dengan seksama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut salah satunya adalah kemungkinan tahanan untuk melarikan diri, sebagaimana yang ditemukan penulis terkait dengan tahanan yang melarikan diri di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang selanjutnya disebut dengan Polrestabes Surabaya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, dalam hal ini ialah Sattahti Polrestabes Surabaya berjalan kurang baik, hal ini mengacu pada berita harian jawa pos memberitakan bahwasanya setidaknya dua tahanan berhasil melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Polrestabes Surabaya, dengan mengergaji terali besi ruang tahanan.¹ Tahanan kepolisian yang berhasil melarikan diri tersebut mengindikasikan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Surabaya masih belum maksimal, meskipun secara kuantitatif kejadian tersebut hanya terjadi sekali menurut data sementara yang diperoleh peneliti, jumlah tahanan yang ada dalam rutan polrestabes Surabaya berjumlah 36 untuk bulan Januari dan 42 untuk bulan Februari per tahun 2016. Sementara, data yang diperoleh secara valid berupa dokumentasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Tahanan di Rumah Tahanan
POLRESTABES SURABAYA
Bulan Juni – Desember 2015

Bulan	Tahanan Kriminal	Tahanan Narkoba	Melarikan Diri	Total Tahanan
Juni	99 orang	66 orang	-	165 orang
Juli	140 orang	67 orang	-	207 orang
Agustus	145 orang	98 orang	-	243 orang
September	143 orang	127 orang	-	270 orang
Oktober	131 orang	152 orang	-	283 orang
November	123 orang	172 orang	-	295 orang
Desember	122 orang	169 orang	2 orang	289 orang
Jumlah Total				1752 orang

Sumber : Polrestabes Surabaya

Data yang telah disebutkan menyatakan bahwasanya rata-rata per bulan jumlah tahanan adalah 100 tahanan, dengan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti di Polrestabes Surabaya menyatakan terbilang ada 14 kamar hunian dengan jumlah total setiap blok dihuni sekitar lebih dari 20 tahanan. Satuan yang menangani kepentingan penahanan tersebut adalah Satuan Tahanan dan Barang Bukti, yang selanjutnya disingkat Sattahti.

Pengaturan yuridis Sattahti ialah sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor KEP/366/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010. Proses pengawasan tahanan yang dilakukan Sattahti dasarnya ialah dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petugas jaga bertugas untuk menerima, mendata, menempatkan dan mengeluarkan Tahanan, memeriksa administrasi penahanan, memeriksa badan dan kesehatan Tahanan yang keluar maupun masuk Ruang Tahanan Polri, memeriksa secara periodik dan insidental paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu antara lain jumlah, kesehatan dan kegiatan Tahanan serta kondisi ruang Tahanan, memeriksa/mengegedah Ruang Tahanan Polri. Petugas jaga tahanan juga wajib untuk mencatat dalam kegiatan jaga Tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban pada Ruang Tahanan Polri, menyimpan barang titipan milik Tahanan sampai dengan mencatat identitas Penyidik dan memeriksa administrasi Bon Tahanan dan nomor

¹<http://www.jawapos.com/read/2015/11/11/10143/4-polisi-jaga-lalai-2-tahanan-polrestabes-surabaya-kabur>

telepon/HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, melaporkan atas setiap kejadian yang menonjol yaitu Tahanan sakit, meninggal dunia, dan melarikan diri kepada pejabat pengembalian fungsi tahti/Kepala Ruang Tahanan, melarang pengambilan gambar/liputan dalam ruang tahanan; dan menjaga terhadap kemungkinan yang terjadi.

Aturan tugas petugas jasa tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, munculnya peraturan yuridis di lingkungan Kepolisian ini tentu berhubungan dengan tingkat pengamanan pada saat penahanan yang dilakukan pihak Kepolisian. Petugas jaga yang berada di ruang tahanan adalah setidaknya ada dua orang, dengan milik besarnya kapasitas setiap kamar hunian yang berisi 20 tahanan, hal ini tentunya riskan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Sattahti, riskan dalam artian dampak akan kaburnya tahanan akan terulang kembali seperti berita kaburnya dua tahanan. Apabila pengawasan yang dilakukan kurang baik maka akan memiliki konsekuensi pada peristiwa kaburnya dua tahanan di Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya, dampaknya ini merupakan akibat kurangnya pengawasan petugas jaga terhadap tahanan ini tentu tidak baik bagi institusi hukum khususnya Polrestabes Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan perihal bagaimana pengawasan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap tahanan dan apa yang menjadi hambatan pengawasan petugas jaga tahanan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Kajian teoritik yang dirangkai dalam penelitian ini antara lainnya mengenai penahanan beserta pengaturan yuridis mengenai apa yang dimaksud penahanan yang terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut ketentuan yuridis KUHAP dan bagaimana seharusnya penahanan dilakukan. Selanjutnya mengenai instansi hukum Kepolisian yang memiliki Satuan Tahanan Barang dan Bukti Sattahti sebagai tempat tahanan yang menjadi subjek penelitian ini.

Proses penyidikan juga dijelaskan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penahanan. Pengawasan Tahanan beserta batasan-batasan yang seharusnya dilakukan sebagaimana peraturan yang melandasinya yakni Peraturan Kapolri yang menjadi dasar kepolisian menjalankan kebijakan penahanan tersebut. Kewenangan penahanan aparat hukum tersebut mengacu pada beberapa kepentingan pada setiap

tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidik sampai dengan proses di pengadilan, dengan diadakannya penahanan diharapkan tersangka atau terdakwa dapat diadili dengan baik sesuai aturan hokum, dengan demikian penjelasan mengenai batasan-batasan tersebut dapat menganalisis lebih dalam terhadap penelitian ini. Uraian faktor penghambat penegakan hukum juga dipaparkan dalam penelitian ini yang memuat lima faktor yakni peraturan perundang-undangan, aparat, sarana, masyarakat dan kebudayaan yang menjadi pisau analisis penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.² Metode penelitian ini menitik beratkan pada observasi. Penelitian ini akan menggambarkan proses pengawasan tahanan yang dilakukan kepolisian Polrestabes Surabaya yakni Sattahti Polrestabes Surabaya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rutan Polrestabes Surabaya, karena Polrestabes Surabaya berada di Ibukota Jawa Timur dan mengingat setiap blok yang berada di Polrestabes Surabaya berisi kurang lebih 20 tahanan dan total kamar hunian yang ada ialah 14 sel sehingga dengan dua orang petugas jaga akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan satuan tahanan dan barang bukti Kepolisian Polrestabes Surabaya. Kondisi Rutan Medaeng Surabaya yang memang peruntukkannya sebagai tempat tahanan tentunya memiliki pengawasan yang lebih, yakni setiap bloknya dijaga empat orang dan tempat keluar penjagaan pintu oleh lima sipir, hal inilah yang membuat peneliti tertarik pada Rutan Polrestabes Surabaya dengan hanya dua petugas jaga pada 14 sel sekaligus.

Penelitian ini akan mengambil informan yang berasal dari kepolisian, yakni anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti/Sattahti, yakni Bapak Isbadi, selaku Kepala Jaga Tahanan dan Bapak Eko Jaga selaku Kepala Tahanan SATTAAHTI. Kepala jaga tahanan dianggap menguasai masalah penelitian dalam melakukan pengawasan terhadap tahanan dan peneliti mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153-154.

Informan selanjutnya ialah tahanan yang berada di Polrestabes Surabaya, antara lain Abdul Rofik dan Safek dan anggota keluarga tahanan. Tahanan merupakan objek penelitian sehingga informasi yang di sampaikan oleh tahanan ketika wawancara akan sangat berguna bagi penelitian ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan , yaitu polisi petugas jaga Sattahti, tahanan dan keluarga tahanan. Data tersebut berupa informasi yang berkaitan erat dengan pengawasan tahanan. Tahanan juga mempunyai peran sebagai informan, hal ini bertujuan untuk menjadi pembandingan data yang diperoleh dari Sattahti.

Data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, kamus-kamus hukum, internet, komentar-komentar terkait dengan masalah yang diteliti dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan pengawasan tahanan di Rutan Polrestabes Surabaya, yakni data mengenai jumlah dan klasifikasi tahanan di Polrestabes. Teknik selanjutnya wawancara yakni mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan polisi yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan pada anggota polisi terutama petugas jaga pengawasan tahanan. Wawancara juga dilakukan kepada tahanan dan keluarga tahanan, karena tahanan merupakan objek pengawasan dalam penelitian sebagai pembandingan kebenaran data dari kepolisian. Observasi juga dilakukan dalam rangka mengumpulkan data, dengan mengamati secara langsung pola perilaku kondisi pengawasan yang dilakukan oleh Sattahti dan ruang tahanan pada jam-jam tertentu, yakni jam 09.00 WIB -10.00 WIB. 11.00 WIB-13.00 WIB. Pada waktu ini dianggap paling rawan, karena ada kunjungan keluarga dan pada siang hari waktu istirahat Personel Kepolisian Polrestabes Surabaya.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³ Peneliti akan menganalisis dan memahami kebenaran

data tersebut dengan ketentuan yuridis peraturan perundang-undangan dan teori perihal hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Sattahti.

PEMBAHASAN

Pengawasan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Terhadap Tahanan

Pengawasan tahanan Polrestabes Surabaya di lakukan oleh bagian Sattahti, yang menunjukkan bahwasanya Sattahti bertanggung jawab atas segala macam aktifitas tahanan mulai saat penerimaan tahanan ditempatkan di Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya sampai dengan selesainya pemberkasan penyidikan atau P-21. Pengawasan tersebut mengacu pada Perkap No 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Perkap Perawatan Tahanan).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan petugas jaga Sattahti terlaksana dengan baik, namun jika diamati secara dalam perihal kenyataan kondisi overload setiap kamar hunian atau sel yang terjadi di Rutan Sattahti Surabaya hanya diawasi dua petugas jaga tersebut masih kurang. Secara regulasi yuridis tidak ada batasan maksimal penempatan petugas jaga di setiap bloknnya, pada Pasal 31 ayat 1 huruf G Perkap Perawatan Tahanan memberikan batasan minimal dua petugas jaga, yang seharusnya Sattahti dapat memberlakukan petugas jaga tambahan bergantung pada kondisi yang terjadi di Rutan sebagaimana kegiatan kontrol petugas jaga yang bisa melakukan pengecekan 30 menit sekali dari ketentuan 1 jam sekali.

Pengawasan tahanan oleh petugas jaga haruslah melihat pada kondisi-kondisi terkini, karena pengawasan merupakan tahapan penting untuk keberlanjutan kepentingan penyidikan yang sedang berjalan, urgensi pengawasan tahanan ialah kekhawatiran para tahanan melarikan diri dan merusak barang bukti yang merupakan unsur penting dalam menentukan tahanan bisa dihukum atau tidak pada proses penyidikan tersebut. Proses penyidikan adalah bagian yang terpisahkan pada pemeriksaan pendahuluan. merupakan serangkaian dari proses yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan yang diawali oleh proses penyelidikan kemudian penyidikan merupakan tahapan penting untuk menentukan seseorang bisa diadili atau tidak yang didalamnya terdapat penahanan dengan tugas pengawasan oleh Sattahti, apabila pengawasan tahanan tidak dilaksanakan dengan baik atau sampai dengan tahanan

³ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 250

melarikan diri maka proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Asumsinya apabila proses penyidikan dengan segala bentuk pengawasan tahanan berjalan dengan baik, maka penyidikan sudah sempurna berkasnya(unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan barang bukti yang menguatkan) untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam proses hukum selanjutnya di pengadilan.

Tugas pengawasan tahanan sebagai bagian perawatan tahanan yang memberlakukan aturan menertibkan tahanan merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Perkap Perawatan Tahanan, karena segala bentuk penyelewengan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh petugas jaga wajib dimintai pertanggung jawaban tindakannya secara yuridis karena proses pengawasan adalah proses yang berkesinambungan dalam penyidikan sehingga memudahkan proses peradilan selanjutnya.

Seperangkat ketentuan yuridis tersebut yakni Perkap Perawatan Tahanan telah terimplementasikan dengan baik, namun pada ketentuan jumlah petugas jaga yang diwajibkan Perkap minimal dua petugas jaga pada pengawasan tahanan masih terlalu kaku dengan jumlah dua petugas jaga pada praktiknya di Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya.

Hambatan pengawasan petugas jaga tahanan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya

Petugas jaga Sattahti Polrestabes Surabaya merupakan komponen aparat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga agar tahanan tidak melarikan diri, oleh karenanya komponen aparat dalam pengawasan ini sangat penting. Namun, petugas jaga juga dapat dikategorikan sebagai hambatan apabila tidak memahami ketentuan dari peraturan yang telah ada yakni Perkap Perawatan Tahanan.

Pemahaman yang kurang terkait jumlah personel penempatan petugas jaga yang berada disetiap bloknya adalah dengan menempatkan dua petugas jaga, bila mengacu pada Perkap Perawatan Tahanan memang diminimalkan hanya dua, namun kondisi tersebut harusnya disesuaikan dengan kondisi jumlah tahanan yang ada di Rutan mengingat tidak ada batasan maksimal jumlah petugas jaga untuk ditempatkan disetiap bloknya. Seperti diketahui pada hasil penelitian, jumlah tahanan di setiap kamar hunian atau sel ialah berjumlah 20 orang dengan jumlah total tahanan sebanyak 315 orang, secara kuantitatif pengawasan yang hanya dilakukan oleh dua

petugas jaga tidak mungkin bisa memantau secara keseluruhan tahanan..

Mengacu pula pada ketentuan tugas pokok petugas jaga pada Keputusan Kapolri Nomor : KEP/366VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010, pada bagian Konsignes menyebutkan tugas Jaga Tahanan adalah mencegah agar tidak terjadi penindasan atau penganiayaan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesucilaan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi tahanan. Artinya, pengawasan tidak saja diperuntukkan untuk menghindari peristiwa tahanan yang melarikan diri melainkan pula mencegah hal-hal yang meresahkan bagi tahanan yang menghuni di Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya.

Peristiwa tahanan melarikan diri memang yang paling dihindari pada proses pengawasan tahanan, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalankan pengawasan tahanan yang merasa gelisah dan takut dikarenakan ada konflik antar tahanan, dengan jumlah petugas dua jaga yang mengawasi tugas pengawasan di Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya masih belum memungkinkan pengawasan tahanan secara komprehensif dapat terlaksana dengan baik.

Kondisi ruang tahanan terali besi yang lemah dan rapuh pada Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya pada hasil penelitian sebelumnya telah dijelaskan mengindikasikan bahwa secara sarana dan fasilitas menjadi suatu hambatan terkait pengawasan petugas jaga Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya, sarana atau fasilitas ini merupakan faktor pendukung untuk menjalankan segala macam bentuk penegakan hukum yang dilakukan termasuk pengawasan tahanan yang dilakukan oleh petugas jaga.

Kamar hunian atau sel yang merupakan sarana dan fasilitas pengawasan tahanan, sarana yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan pengawasan tahanan yang baik, efektif maupun efisien. Kondisi kamar hunian yang rusak atau tidak layak hendaknya segera diperbaiki sebagaimana teori hambatan Sojono Soekanto yang memberikan jalan pemikiran berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang rusak yakni “yang rusak - diperbaiki” memiliki makna logika yang sederhana, artinya hendaknya kamar hunian yang rusak atau tidak layak tersebut sesegera mungkin diperbaiki agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahanan melarikan diri dan konflik antar tahanan dapat dihindari sedini mungkin.

Pokok permasalahan hambatan juga terjadi pada kamar hunian yang normal, namun terbatas pada kapasitas peruntukkannya, yakni kamar hunian diisi

oleh 20 tahanan yang membuat tahanan satu dengan lainnya berselisih atau secara tidak langsung hal ini yang dapat mempengaruhi tahanan tidak betah dengan kondisi konflik yang kerap terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan terkait pengawasan Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya yaitu mekanisme pengawasan dilakukan oleh dua petugas jaga melalui kontrol pada setiap 1 jam sekali untuk memonitoring keadaan Rumah Tahanan pada setiap kamar hunian atau sel, secara kuantitatif pengawasannya kurang maksimal hal ini dikarenakan jumlah blok rumah tahanan ada 2 blok yang setiap blok berisi 7 sel dan setiap sel berisikan lebih dari 20 tahanan.

Hambatan yang terjadi meliputi aparat yakni petugas jaga tahanan yang hanya berjumlah dua orang serta sarana ruang tahanan yang tidak layak atau rusak dan kelebihan kapasitas sehingga memungkinkan tahanan melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melarikan diri.

Saran

Saran yang hendak disampaikan terkait pengawasan tahanan di Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya adalah: Petugas jaga hendaknya ditambah sesuai dengan kondisi Rutan Sattahti Polrestabes Surabaya yang overload, mengingat Perkap Perawatan Tahanan tidak ada batasan maksimal sehingga pengawasan bukan hanya sekedar menjaga tahanan melarikan diri melainkan pengawasan yang dilakukan terhadap tahanan bisa menyeluruh.

Ruang tahanan hendaknya diperbaiki untuk yang keadaanya rusak atau tidak layak dan pembangunan ruang tahanan hendaknya ditambahkan mengingat kapasitas kamar hunian atau sel yang overload di Rutan Sattahti Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasan Madani, Nico Ngani, dan I Nyoman Budi Jaya. 2006. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty.

Mukti Fajar Ali dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia.Pernyataan Berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia*.Kitab Undang-undang Hukum Pidana.LN Nomor 157 Tahun 1958 TLN Nomor 1660.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia*

Salam, Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Yogyakarta: Rangkang education.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

_____. *2007_Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT.RajaGrafindo.

Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Yatno Hutagaol <http://www.jawapos.com/read/2015/1/11/10143/4-polisi-jaga-lalai-2-tahanan-polrestabes-surabaya-kabur>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2016, pukul 09.30 WIB